

**LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU TAHUN 2022**



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi Publik. Selain itu, setiap Badan Publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Azas Pelayanan Informasi Publik Azas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung mengacu pada core values ASN yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada tanggal 27 juli 2021 yaitu "BerAKHLAK". BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Core values BerAKHLAK memiliki penjabaran lebih rinci yaitu:

1. Berorientasi Pelayanan: Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti
2. Akuntabel: Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3. Kompeten: Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4. Harmonis: Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain. Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5. Loyal: Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD RI 1945, setia kepada NKRI serta Pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik

sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara. Menjaga rahasia jabatan dan negara

6. Adaptif: Cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas. Bertindak proaktif
7. Kolaboratif: Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama.

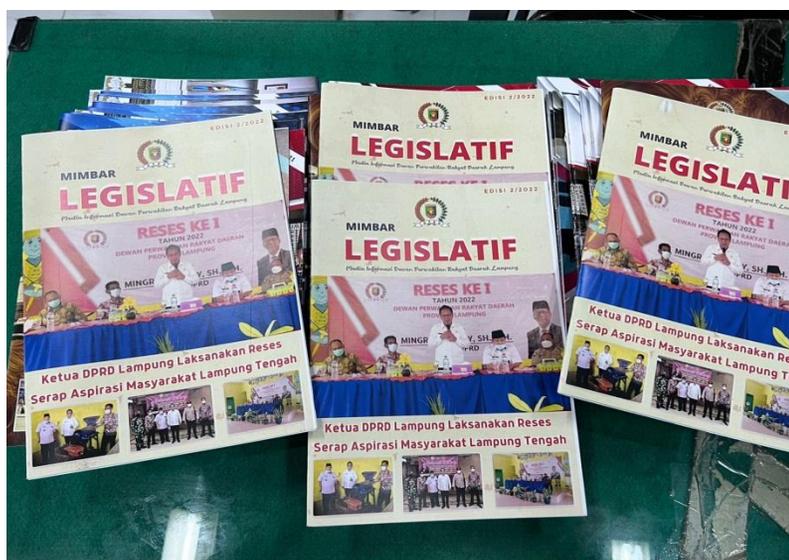
BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2022, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID pembantu pada bagian Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sudah memadai untuk melaksanakan kegiatan, tetapi masih diperlukan penambahan dan pembenahan guna menunjang kelancaran operasional PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki yaitu :

1. Sarana pelayanan informasi dan ruang kerja PPID pembantu, terdiri dari :
 - a. SDM
 - b. PC/Laptop (satu unit)
 - c. Jaringan wifi internet
 - d. Meja dan kursi
 - e. Printer
2. Sarana sosialisasi dan dokumentasi cetak dan elektronik serta media sosial Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, yaitu :
 - a. Majalah Mimbar Legislatif
 - b. Instagram @dprdlampung
 - c. www.facebook.com/dprdlampung
 - d. [dprdprovinsilampung3283](https://www.instagram.com/dprdlampung)



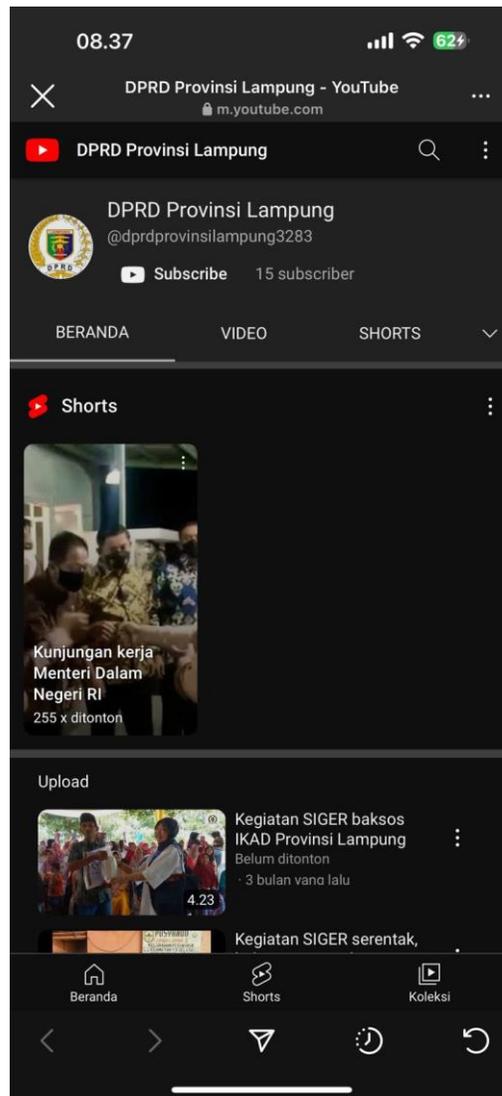
(Majalah Mimbar Legislatif)



(Facebook DPRD Provinsi Lampung)



(Instagram DPRD Provinsi Lampung)



(Youtube DPRD Provinsi Lampung)

I. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Lampung memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari Pukul 08.00- 15.30 WIB, Khusus untuk hari Jumat pelayanan informasi dilakukan mulai pukul 08.00- 16.00 WIB (Dengan satu jam ISHOMA). Meskipun jam kerja layanan Informasi di desk Informasi dibatasi jam kerjanya, namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk melakukan permohonan informasi secara tidak langsung dengan melakukan direct message (DM) instagram DPRD Provinsi Lampung ataupun melalui email : lampungdprd1@gmail.com

Kategori informasi publik yang dapat diupload dalam media sosial maupun cetak adalah berita – berita, dokumen dokumen berkaitan dengan kegiatan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

Kategori informasi publik yang dikecualikan Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan yaitu:

1. Menghambat proses penegakan hukum.
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional.

II. Sengketa Informasi Publik

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukannya alasan tersebut. Apabila Pemohon Informasi Publik merasa tidak puas atas tanggapan keberatan. Pemohon informasi dapat meminta penyelesaian sengketa informasi Publik melalui Komisi Informasi Daerah. Proses pelayanan sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja dan putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat. Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat permintaan informasi publik yang mengajukan keberatan atas tanggapan informasi yang disampaikan oleh PPID Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

Kesimpulan Pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sudah terlaksana cukup baik. Tersedianya sarana penunjang pelayanan informasi berupa majalah, website, dan media sosial yang memuat informasi yang wajib disediakan serta informasi yang diumumkan secara berkala. Tidak adanya permohonan informasi publik yang ditolak karena tidak termasuk ke dalam kategori dikecualikan. Namun demikian masih banyak yang perlu ditingkatkan untuk menyediakan pelayanan informasi publik yang lebih baik.

II. Saran

Saran dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pelayanan informasi yang baik, maka perlu dilaksanakan bimbingan teknis di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
2. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Database Informasi
3. Penambahan SDM pengelola layanan informasi
4. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi
5. Perlu adanya anggaran khusus untuk PPID.

LAMPIRAN

Ketua DPRD Lampung Terima Kunjungan Silaturahmi Rektor ITERA

Rektor Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha melakukan kunjungan silaturahmi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mingrum Gumay SH., MH., di Kantor DPRD Lampung, Senin, 22/8/2022. Dalam kesempatan tersebut Rektor ITERA didampingi Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T., dan Sekretaris LPPM Dr. Raden Putra.

Pada kunjungan tersebut Rektor ITERA menyampaikan, sebagai pimpinan baru ITERA, dirinya berkewajiban bersilaturahmi dengan masyarakat dan tokoh-tokoh di Provinsi Lampung. Untuk itu, setelah beberapa waktu lalu bersilaturahmi dengan Gubernur Lampung, Rektor ITERA bersilaturahmi dengan Ketua DPRD Provinsi Lampung, untuk membangun sinergi antar institusi.

Rektor juga kembali menyampaikan komitmen mendukung program-program pemerintah daerah Provinsi Lampung. Salah satu program yaitu mendukung bidang pertanian.

Rektor menyebut, Provinsi Lampung banyak menyimpan potensi di bidang pertanian dan perkebunan, mulai dari, karet, sawit, singkong, dan lainnya. Untuk itu peran ITERA adalah mendukung lahirnya inovasi hasil-hasil pertanian tersebut. “Sehingga ITERA benar-benar bisa bermanfaat dan maslahat bagi masyarakat Lampung,” ujar Rektor.

Sementara Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay S.H., M.H., menyampaikan rasa bangga dengan perkembangan ITERA dan berkomitmen untuk selalu mendukung ITERA. “Kami berharap selain menjadi kampus kebanggaan Lampung, ITERA juga memiliki keunggulan, seperti ITB, dan ITS,” ujar Mingrum. Mingrum juga berharap agar ITERA menjadi tempat menghasilkan cendekiawan-cendekiawan yang akan membangun Provinsi Lampung.

Sementara Ketua JTIC Dr. Rahayu Sulistyorini, berharap ITERA dan pemerintah daerah Provinsi Lampung dapat berkolaborasi dalam

membangun ITERA. Salah satu program pembangunan yang diusulkan adalah pembangunan asrama mahasiswa hingga poliklinik bagi civitas akademika ITERA.

Menanggapi beberapa usulan pembangunan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung, menyarankan agar selain berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ITERA juga dapat membangun kolaborasi dan bermitra dengan pihak swasta, melalui forum CSR Lampung untuk turutserta membangun kampus.



Akademisi Jadi Politis, Ini Profil Elly Wahyuni Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung

Akademisi berpindah menjadi politisi, simak perjalanan politik dan profil Elly Wahyuni Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Lampung. Sebelum menjadi anggota DPRD, putri daerah Lampung Elly Wahyuni, awalnya menekuni profesi dosen di Universitas Bandar Lampung (UBL) pada tahun 1987 silam. Kini Elly Wahyuni sukses sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung 3 periode. Terhitung sejak periode 2009- 2014, 2014-2019 dan 2019-2024. Tidak hanya sebagai anggota parlemen, Elly Wahyuni bahkan menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD I Provinsi Lampung dari partai Gerindra.

Saat ditanya apa alasan Elly wahyuni beralih profesi dari akademisi ke politisi, ia menceritakan perjalanan karirnya. "Jadi awalnya waktu saya jadi Dosen Ekonomi di UBL, banyak sekali Partai Politik yang menawarkan saya untuk bergabung sebagai anggota Partai.

"Namun, saya masih ragu lalu kemudian ada teman saya mengajak untuk bergabung di Partai Gerindra dan saya langsung tertarik," kata Elly Wahyuni, Senin (8/8/2022).

Selanjutnya Elly Wahyuni mengatakan alasannya tertarik bergabung ke Partai Gerindra. "Pertama saya tertarik dengan partai Gerindra karena setelah saya cari tau siapa ketua partai Gerindra yakni Prabowo Subianto, dan anak Soemitro Djojohadikoesoemo yang merupakan begawan ekonomi," terangnya. "Saya kan alumni Ekonomi Unila, jadi saya pikir begawan Ekonomi artinya dia akan menata Ekonomi Indonesia, nah dari pendidikan, kita tidak dapat berbuat banyak jika kita tidak nyemplung atau ada di dalam dunia penentu kebijakan, itu lah alasan awalnya saya tergabung di Gerindra," tambahnya. Dikatakannya jika diawal bukan Partai Gerindra yang memintangnya sebagai kader dia tidak akan tergabung dan berkecimpung di dunia politik hingga sejauh ini.

Saat disinggung seperti apa pengalaman politik sebelum ia tergabung di Partai Gerindra, Elly Wahyuni mengatakan aktif di Organisasi Eksternal Kampus. "Ya waktu masih Mahasiswa saya memang ikut Organisasi Eksternal yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan pernah menjadi ketua

Kohati HMI Cabang Bandar Lampung di tahun 1983-1984. "Di HMI saya banyak belajar dalam mengatur sebuah organisasi, kita sebagai aktivis biasa bergaul, biasa mengungkapkan pendapat, biasa berdiskusi sehingga pada saat duduk sebagai anggota dewan sudah tidak kaku lagi," tuturnya.

Saat disinggung kembali posisi Elly Wahyuni di Pemilu 2024 apakah akan tetap melanjutkan karir di Legislatif atau justru beralih sebagai calon kepala daerah di kabupaten/kota. Ia mengatakan akan patuh terhadap keputusan partai.

"Sebagai kader tentunya saya patuh apa yang menjadi perintah partai, tapi jika saya pribadi tetap akan melanjutkan sebagai calon anggota DPRD Provinsi Lampung, tapi keputusan itu nanti lah."

"Berkecimpung di bidang politik, sebagai kader kita harus bisa mengukur kemampuan diri kita sendiri," kat dia. Di akhir Elly Wahyuni berpesan tertuju untuk perempuan.

"Perempuan harus mampu mandiri, karena dengan kemandirian lah kita bisa mengambil keputusan, jangan menjadi perempuan yang tergantung dengan orang lain, minimal perempuan harus mampu menghidupi diri sendiri," tutupnya.

Wakil Ketua DPRD Lampung Ririn Kuswantari Minta Dukungan Polda Kegiatan Komunitas Perempuan

Wakil Ketua DPRD Lampung Ririn Kuswantari meminta Kapolda Irjen Pol Akhmad Wiyagus bisa mendukung kegiatan komunitas perempuan politik dalam perlindungan anak dan perempuan.

Hal itu disampaikan Ririn saat bersama anggota Komisi I lainnya bertemu Kapolda di Mapolda setempat, Selasa lalu, (9/8/2022).

Punggawa Golkar tersebut mengatakan, dukungan Polda akan sangat membantu pihaknya dalam kegiatan yang ranahnya perlindungan anak dan perempuan.

Ririn menjelaskan, adanya kehadiran kepolisian dalam bidang ini akan memiliki dampak yang signifikan.

Selain itu, bisa mempercepat terwujudnya daerah yang ramah anak.

Ririn menjelaskan, kini banyak komunitas yang peduli terhadap hal itu. Hal itu membutuhkan partisipasi aktif Polda Lampung.

Ririn berharap, keinginan ini bisa dipenuhi. Ririn meyakini, di bawah kepemimpinan Irjen Pol Akhmad Wiyagus, Polda Lampung bisa menampilkan kinerja yang lebih baik dari periode-periode sebelumnya.



Raden Muhammad Ismail Imbau Pembangunan Masjid di Taman Gajah Pindah ke Kota Baru

Wakil Ketua III DPRD Lampung Raden Muhammad Ismail meminta rencana pembangunan masjid di Kompleks Taman Gajah dipindahkan ke kawasan Kota Baru, Jatiagung, Lampung Selatan.

"Kalau dibilang setuju, ya setuju. Karena kan niatnya baik membangun tempat ibadah, tapi alangkah baiknya jika dibangun di tempat lainnya," katanya, Senin (10/1/2022)

Namun Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung itu juga meminta segala bentuk perencanaan tersebut harus benar-benar dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai lokasi tersebut.

"Mungkin bisa dibangun di Kota Baru. Setuju, iya tapi lokasinya diperhitungkan kembali," jelas politisi Partai Demokrat ini.

Alasannya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Lampung tergolong sedikit. Sehingga, kata dia, sangat disayangkan jika fungsi Taman Gajah dihilangkan.

"Kita punya sedikit RTH, tapi masa mau diubah dengan bangunan yang lain," terangnya.

Menurut Raden, Taman Gajah itu merupakan salah satu aset Pemprov Lampung yang peruntukannya untuk RTH yang dilengkapi dengan sarana olahraga gratis dan lainnya.

Jika ingin diubah, Raden mempersilakan agar mengikuti prosedur yang ada. Di antaranya meminta izin dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Kemudian persetujuan dari DPRD Lampung tentang penghilangan aset dan pemerintah harus menyediakan tempat pengganti bangunan yang dihilangkan tersebut.

"Jadi, itu bangunan ada izinnya dari Kemenpora, dan paling tidak jika ingin diubah maka harus diberikan tempat pengantinya. Karena semua itu harus

melalui prosedur yang sah yakni melalui pengesahan dari DPRD tentang penghilangan aset," tegasnya.

Selain itu, tambah Raden, harus ada kepastian dan kejelasan terkait pengelolaan pembangunan masjid tersebut.

"Harus ada kepastian siapa yang akan mengelola pembangunan tersebut harus ada kepastian dari pihak ketiga dan itu diberikan kepastiannya kepada kita dan lahan pengganti pun dilihatkan atau disediakan," pungkasnya.

Fauzan Sibron Soroti Jalan Rusak Exit Tol Lambu Libang Tubaba

Wakil Ketua DPRD Lampung Fauzan Sibron menyoroti kondisi ruas jalan yang rusak di Provinsi Lampung. Salahsatunya adalah Jl. Raya SP Randu Unit 6, Kibang Budi Jaya, Lambu Kibang, Kabupaten Tulangbawang Barat. Ini merupakan akses menuju pintu tol Lambu Kibang.

Punggawa Nasdem ini mengatakan, akan menekankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Provinsi Lampung terkait hal ini. Seyogianya memang akses setelah Jalan Tol seharusnya memiliki kondisi kemantapan yang cukup. Sebab, di Lambu Kibang juga merupakan pintu masuk dari Sumatera Bagian Selatan ke Lampung melalui Tubaba dan sekitarnya. "Tentu yang disajikan harus rapih. Kalau akses begitu juga kan berpengaruh terhadap image, wajah provinsi Lampung. ," ujarnya, Rabu (12/1/2022).

Dia mengatakan, jika di ruas jalan tersebut sudah mantap, maka sudah barang tentu, akan memberi keuntungan terhadap banyak pihak khususnya para pengendara. Selain kenyamanan melintas, pun bisa mengemati cost pengeluaran. Sebab, ruas jalan tersebut juga menghubungkan tiga kabupaten yakni Tubaba, Tulangbawang, dan Waykanan. "Kawasan tersebut juga adalah kawasan strategis ekonomi termasuk pertanian. Sehingga ketika jalur kondisinya baik, maka ekonomi dikawasan tersebut akan baik termasuk para petani," terangnya.

Politikus Partai NasDem ini mengatakan, ruas tersebut seharusnya sudah masuk dalam perencanaan perbaikan melalui penggunaan pinjaman PT Sarana Mukti Infrastruktur (SMI) yang totalnya mencapai Rp569 miliar. "Salahsatu urgensitas pinjaman itu adalah perbaikan ruas jalan di Lambu Kibang itu. Jadi kita dorong secepatnya dilakukan actionnya," ujarnya.

Dikonfirmasi, Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Lampung M.Taufiqullah mengatakan, berjanji akan melaksanakan penanganan perbaikan terhadap ruas jalan tersebut. Di mana, perencanaan penanganan suah masuk dalam perencanaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung tahun anggaran 2022.

Namun, Taufiq menjelaskan, di dalam perencanaan, penanganan ruas jalan Raya SP Randu Unit 6, Kibang Budi Jaya, Lambu Kibang, Kabupaten Tulangbawang Barat, anggarannya bukan bersumber dari pinjaman PT SMI senilai Rp569 miliar. “Ada penanganannya namun bukan dari PT SMI. Itupun tidak semua. Fokus penanganannya tahun ini yang menuju ke arah Waykanan terlebih dahulu, tidak full,” ujarnya. Dia menjamin akan melakukan perbaikan sesuai dengan perencanaan dan uregistas. “Sudah yang jelas tahun ini ditangani. Nah, untuk tayang lelang secepatnya,” ujarnya.



AML Bawa Empat Tuntutan ke DPRD Lampung

Aliansi Masyarakat Lampung (AML) menyambanggi gedung DPRD Provinsi Lampung, Rabu (5/1/2022).

Mereka diterima anggota komisi V DPRD Lampung di antaranya Yozi Rizal dan Yanuar Irawan.

Pada pemaparannya AML mengusung empat tuntutan, yaitu :

1. AML menuntut Pemerintah mengedepankan usaha persuasif tanpa unsur paksaan apa pun terkait pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 dan menghilangkan sanksi administratif serta pidana bagi warga yang belum berkenan divaksin.

2. AML menuntut Pemerintah mendengarkan banyaknya keberatan para ulama, terutama pengasuh ponpes terkait penerapan UU Nomor 18 tahun 2019 beserta turunannya.

Pemerintah wajib memberi kebebasan penuh dan menyeluruh kepada ponpes guna mengelola institusinya secara mandiri, tanpa intervensi dan campur tangan dari pihak mana pun.

"Para kiai dan ulama pengasuh ponpes adalah orang yang paling paham tentang anak didik dan lingkungan ponpes. Seharusnya mereka diajak duduk bersama saat merumuskan UU Ponpes No 18/2019 sehingga UU yang dihasilkan sesuai dengan yang dibutuhkan guna tumbuh kembang ponpes," jelas Kiai Muhammad Sulthon, kordinator AML yang juga pengasuh Ponpes Jabal An-Nur di Batuputu, Bandarlampung.

3. AML menuntut Pemerintah segera membebaskan Habib Rizieq Shihab dari perkara hukum yang saat ini dipersangkakan kepadanya.

AML juga menuntut Pemerintah segera membebaskan ulama-ulama lain yang saat ini dipenjara dan patut diduga mengalami kriminalisasi terhadap dirinya.

4. AML menuntut Pemerintah membatalkan penghapusan bahan bakar jenis premium dan pertalite. Sekaligus menurunkan harga sembako demi terjaminnya pelaksanaan sila ke-5 Pancasila.

Perwakilan ibu-ibu yang tergabung dalam AML, yang juga aktif sebagai Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Lampung Utara, Merry meminta aspirasi ini dibawa ke DPR RI dan Pemerintah Pusat.

Menanggapi, Yanuar menyatakan dirinya mengapresiasi kedatangan AML.

"Karena DPRD merupakan tempat yang benar guna menyampaikan semua aspirasi. Bahkan dalam sebulan, kami dua kali melakukan kunjungan ke dapil masing-masing," ujarnya Yanuar mewakili anggota komisi V lainnya.



Anggota DPRD Lampung Watoni Nurdin Bantu Bocah Kelainan Syaraf

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Nurdin mengunjungi Kaila Sri Safitri, bocah berusia 6 tahun yang menderita penyakit kelainan syaraf sejak lahir. Kehadiran Watoni di dampingi langsung oleh Kepala Desa Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran Indah, Muharyanto, Selasa (22/2/2022).

Legislator PDIP itu mengungkapkan rasa keprihatinan terhadap kondisi Kaila yang telah lama menahan rasa sakit. “melihat kondisi Kaila saya turut prihatin, dan insyaallah saya akan membantu memfasilitasi Kaila agar dapat menjalani terapi sesuai anjuran dari dokter spesialis” terangnya.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung itu juga memberikan motivasi kepada kedua orang tuanya agar tidak putus asa dalam merawat sang buah hati. Ia juga meminta kepada Pemerintah melalui dinas terkait untuk memberikan perhatian kepada salah satu warganya ini. Untuk di ketahui, buah hati pertama pasangan Basuki dan Fitri ini terlahir secara prematur di usia kandungan sang ibu yang baru berumur 7 bulan. “Kaila lahir premature diusia tujuh bulan, pada waktu mau diberi nama tiba-tiba muntah-muntah dan warnanya coklat pekat dan langsung kami bawa kerumah sakit, kami dari pagi dirumah sakit tapi baru dapat perawatan jam dua belas malam” ujar Basuki.

Kaila sendiri pernah menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah Abdul Muluk dan menggunakan BPJS Kesehatan Mandiri selama satu bulan lamanya. Namun, karena keterbatasan ekonomi membuat kedua orang tua Kaila terpaksa membawanya pulang dan di rawat di rumah seadanya.

Saat ini BPJS Kesehatan Mandiri yang pernah di buat dulu saat Kaila di rawat di RSUDAM sudah tidak bisa di gunakan bahkan terhutang, jika ingin menghidupkan kembali BPJS kedua orang tua Kaila harus membayar sebesar Rp. 1.200.000. ”kami orang gak mampu pak, dari pada buat angsur BPJS mending buat beli susu kaila” ungkap ibunya. Prematur di usia kandungan sang ibu yang baru berumur 7 bulan.

“Kaila lahir premature diusia tujuh bulan, pada waktu mau diberi nama tiba-tiba muntah-muntah dan warnanya coklat pekat dan langsung kami bawa kerumah sakit, kami dari pagi dirumah sakit tapi baru dapat perawatan jam dua belas malam” ujar Basuki.

Kaila sendiri pernah menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah Abdul Muluk dan menggunakan BPJS Kesehatan Mandiri selama satu bulan lamanya. Namun, karena keterbatasan ekonomi membuat kedua orang tua Kaila terpaksa membawanya pulang dan di rawat di rumah seadanya. Saat ini BPJS Kesehatan Mandiri yang pernah di buat dulu saat Kaila di rawat di RSUDAM sudah tidak bisa di gunakan bahkan terhutang, jika ingin menghidupkan kembali BPJS kedua orang tua Kaila harus membayar sebesar Rp. 1.200.000. “kami orang gak mampu pak, dari pada buat angsur BPJS mending buat beli susu kaila” ungkap ibunya kepada anggota Legislatif tersebut.



Terkait Pengisian Jabatan Wakil Bupati Lampung Utara, Komisi I DPRD Lampung Ingatkan Pentingnya Kelegowoan Partai Politik

Yozi Rizal, Ketua Komisi I DPRD Lampung menyampaikan pentingnya kelegowoan dan otokritik sebagai partai politik atas keterlambatan proses pengisian jabatan Wakil Bupati Lampung Utara, sehubungan dengan kekosongan jabatan tersebut semenjak Budi Utomo dilantik oleh Gubernur Arinal, 3 November 2021 yang lalu sebagai Bupati Lampung Utara hingga 2024.

Demikian dikatakan Yozi Rizal saat dilakukan pertemuan antara Komisi I DPRD Lampung dengan Komisi I DPRD Lampung Utara dan Biro Otda Pemprov Lampung, Senin (7/3/2022). "Tentu kita dipartai politik, khususnya parpol yang mengusung pasangan pemenang Pilkada Lampung Utara tahun 2019 lalu patut otokritik, agar preseden seperti ini tidak lagi terjadi," kata Yozi Rizal.

Bendahara Partai Demokrat Lampung ini, mengungkapkan pula bahwa secara administratif tata pemerintahan, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah telah melayangkan surat resmi kepada Bupati Lampung Utara perihal proses pengisian jabatan Wakil Bupati Lampung Utara tersebut. "Gubernur telah melayangkan surat ke Bupati Lampung Utara sebanyak 3 kali, hal inipun telah dikonfirmasi oleh Biro Otda Provinsi bahkan pada 16 Desember lalu, Biro Otda melakukan sanjau (kunjungan) ke Lampung Utara," ungkap Yozi Rizal.

Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung, Mardani Umar, mengatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati merupakan dwitunggal dan bekerja secara berkolaborasi. Kata dia, selama ini Lampung identik dengan disharmoni antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau ketika situasi tertentu menjadikan Wakil Kepala Daerah naik Jadi Kepala Daerah. "Lalu kelihatan terlalu nyaman dengan kesendirian, maka lebih memilih jadi jomblo dari pada berkolaborasi. Ada apa ya?," tanya Mardani.

Rachmat Hartono, Ketua Komisi I DPRD Lampung Utara dalam paparannya pada saat audiensi menjelaskan bahwa kehadirannya di Komisi I DPRD Lampung dalam rangka menyampaikan kondisi pemerintahan daerah terlebih terkait pengisian jabatan Wakil Bupati. "Kami di DPRD Lampung Utara sudah merasa mentok betul, uang negara telah banyak keluar dalam rangka

memproses pemilihan wakil bupati di DPRD melalui panitia khusus, namun sampai sekarang merasa belum ada kejelasan lanjutannya” jelas Rachmat Hartono.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berharap betul ada saran dari Komisi I DPRD Lampung. Merespon hal tersebut, Budiman AS, Anggota Komisi I DPRD Lampung mengusulkan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Lampung pada saat pertemuan tersebut, untuk berkunjung dan melakukan audiensi secara resmi kepada Bupati Budi Utomo di Lampung Utara. “Bagaimana Komisi I DPRD Lampung berkunjung dan melakukan audiensi kepada Bupati Budi Utomo untuk memperjelas proses pengisian Jabatan Wakil Bupati Lampung Utara ini,” tutup Budiman AS.



Ini Daftar Nama Anggota Pansus LKPj Gubernur dan Dana Bantuan Parpol 2021

DPRD Provinsi Lampung Langsungkan Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2021, Senin (18/4/2022).

Rapat dengan agenda kedua ini dipimpin oleh Wakil Ketua Elly Wahyuni (Gerindra). Agendanya adalah Pembentukan Pansus Pembahasan LKPj Kepala Daerah Tahun 2021 dan Pembahasan Laporan Bantuan Partai Politik Tahun 2021.

Seluruh Fraksi di DPRD Lampung mengusulkan beberapa anggotanya untuk menjadi anggota Pansus. Kemudian, saat rapat, para anggota melaksanakan musyawarah untuk memilih pimpinan Pansus.

Setelah musyawarah, Pansus LKPJ Kepala Daerah atau Gubernur Tahun 2021 diketuai oleh Noverisman Subing (Subing), Wakil Ketua Vittorio Dwison dan Sekretaris yang awalnya Ikhwan Fadil Ibrahim (Gerindra) diganti Suprpto (PAN).

Ikhwan Fadil dalam rapat mengatakan, Fraksi Gerindra sudah tidak memiliki jatah pimpinan Pansus, dan sekarang giliran Fraksi PAN. Ikhwan kemudian mengusulkan Suprpto jadi Sekretaris dan disetujui peserta rapat paripurna.

Berikut anggota Pansus LKPJ Gubernur dari PDIP yakni Yanuar Irawan, Budhi Condrowati, Lesty Putri Utami, Dadang Sumpena. Dari Gerindra yakni Mukhlis Basri, Mikdar Ilyas, dan Ikhwan Fadil Ibrahim.

Selanjutnya, dari Golkar ada Ismet Roni, Supriadi Hamzah, dan Darlian Pone. Demokrat diwakili Hanifal dan Amaludin. Nasdem diwakili Siti Rahma dan Mardiana.

Sementara itu, PKB diwakili oleh Oktarijaya, PKS oleh Syarif Hidayat, dan PAN oleh Abdullah Surajaya.

Kemudian, Pansus Pembahasan LKPJ Dana Bantuan Partai Politik tahun 2021 diketuai oleh Mardani Umar (PKS), Wakil Ketua Yusirwan dan Sekretaris Apriliati (PDIP).

Anggota adalah, dari PDIP yakni Kostiana, Watoni Nurdin, dan Nurul Ikhwan. Gerindra yakni Mirzalie, Very Agusli HTB, dan I Made Suarjaya. Sementara, Golkar diwakili I Made Bagiasa, Aswar Yaqub, dan Ali Imron.

Demokrat diwakilin Muhammad Khadafi Azwar dan Budiman AS. Nasdem oleh Wahrul Fauzi Silalahi dan Nuril Anwar, PKB oleh Azuwansah dan Maksum Asrori, PKS diisi oleh Heni Susilo dan gabungan PAN dan PPP Supriyatno.

Elly Wahyuni mengatakan, setelah ini Pansus akan bekerja untuk membedah LKPJ Gubernur Lampung dan LKPJ Partai Politik tahun 2021 sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna berikutnya.



DPRD Lampung Rombak Komposisi AKD Setiap Komisi

DPRD Provinsi Lampung merombak komposisi alat kelengkapan dewan (AKD) di masing-masing komisi. Hal itu dibacakan dalam rapat paripurna internal DPRD Lampung, dalam rangka perubahan alat kelengkapan DPRD periode 2019-2022, Senin (9/5/2022).

Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, bersama Wakil Ketua, Ririn Kuswantari, Elly Wahyuni, Raden Muhamad Ismail, dan Fauzan Sibron dan dihadiri anggota.

Dalam perombakan tersebut yang cukup mencolok yakni posisi Ketua Komisi II. Ketua komisi II yang sebelumnya dijabat oleh Budi Yuhanda diganti oleh Siti Rahma dari Fraksi NasDem. Sementara Budi Yuhanda saat ini menduduki posisi Wakil Ketua Komisi V DPRD Lampung. Kemudian posisi ketua komisi I, III, IV, dan V masih tetap.

Rinciannya, pada komisi I Yozi Rizal sebagai Ketua, Mardani Umar sebagai Wakil Ketua dan I Made Suryajana sebagai Sekretaris dengan anggota Watoni Nurdin, Ketut Rameo, Sahdana, Patimura, Darlian Pone, Budiman AS, Wahrul Fauzi Silalahi, Azuwansyah, Vittorio Dwison dan Ahmad Fitoni

Pada Komisi II, Siti Rahma ditunjuk sebagai ketua, I Made Bagiasa Wakil Ketua, dan Lesti Putri Utami sebagai sekretaris dengan anggota Dadang Sumpena, Nurul Ikhwan, Rakhmat Mirzani Djausal, Fahrorrozi, Supriyadi Hamzah, Asep Makmur, Muhammad Khadafi Azwar, Nuril Anwar, Maksum Asrori, Hanifah, Zunianto, Heni Suslio, Darwin Hipni dan Supriyanto.

Pada Komisi III, Ikhwan Fadil Ibrahim sebagai ketua, Noverisman Subing sebagai Wakil Ketua, dan Hanifal sebagai Sekretaris dengan anggota Lenistan Nainggolan, Yose Rizal Nurhasanah, Ferliska Ramadhita Johan, Ahmad Giri Akbar, Siman, Ali Imron, Imam suhada, Binti Amanah, Semin dan Yusirwan. Komisi IV Ketua yakni Ismet Roni, Wakil Ketua Joko Santoso, dan Sekretaris Kostiana dengan anggota Ni Ketut Dewi Nadi, Sahlan Syukur, Mukhlis basri, Mirzalie, Azwar Yacub, Midi Iswanto, Angga Satria Pratama, Mardiana, Garinca Reza Pahlevi, Okta Rijaya, Soni setiawan, Puji Sartono, Ade Utami Ibnu, dan Abdullah Surajaya.

Pada Komisi V, Yanuar Irawan sebagai Ketua, Budi Yuhanda Wakil Ketua dan, Mikhdar Ilyas sebagai Sekretaris dengan anggota Aprilati, Ar Suparno, Budhi Condrowati, Veri Agusli, Ferdi Ferdian, I gede Jelantik, Ahmad Iswan H Cahya, Deni Ribowo dan Jauharoh.

Kemudian untuk Badan Kehormatan diisi Syarief Hidayat, dan Azwar Yacub. Kemudian Bapemperda diisi oleh Jauharoh dan Darwin Hipni Budi Yuhanda membenarkan jika dirinya saat ini menduduki Kursi Wakil Ketua Komisi V DPRD Lampung mendampingi Yanuar Irawan.

"Iya benar," kata dia, Selasa (10/5/2022).

Dia tak berkomentar banyak terkait perubahan tersebut.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Lampung Raden Muhammad Ismail mengatakan pergantian komposisi itu dilakukan sebagai penyegaran AKD di DPRD Lampung.

Perubahan tersebut sudah berlaku setelah keputusan dibacakan dalam rapat paripurna.

"Iya sudah diparipurnakan, dan mulai sudah aktif (hari ini)," ujar Raden Muhammad Ismail.



Mingrum Gumay Hadiri Pelatihan Teknis Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Provinsi Lampung

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Lampung bertempat di Aula Hotel Horison Jalan Kartini Bandar Lampung, Selasa (21/06/2022) menggelar Pelatihan Teknis Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) selama dua hari tanggal 21 dan 22 Juni 2022. Pelatihan Teknis Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) diikuti Ketua Bidang serta Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) perwakilan P3A se-Propinsi Lampung yakni 12 Kabupaten/Kota. Kegiatan Pelatihan Teknis Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Lampung ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung, Ir. Kusnardi M.Agr.Ec.

Dalam kegiatan Pelatihan Teknis Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ini juga dihadiri langsung Ir. Rahmanto, MSc. Director Irigasi Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Ketua Umum Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Lampung Mingrum Gumay S.H, M.H, Kepala Dinas Daerah Aliran Sekampung (DAS) Lampung Ir. Sudarman Sudarto, Kepala UPT Pengairan Wilayah II Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Lampung Ir. Yeni Rianto serta I Made Bagiasse Wakil Ketua Komisi II DPRD Lampung yang juga Wakil Ketua Umum P3A Propinsi Lampung, Winardi Sekertaris P3A Lampung, dan seluruh Ketua P3A se-kabupaten/kota se-Lampung.

Mingrum Gumay Ketua Umum Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Lampung dalam sambutannya mengatakan, keberadaan P3A harus berintegritas, berdaulat, independent, mandiri bermartabat serta tidak terkontaminasi politik apapun. P3A ini merupakan pekerja sekaligus pahlawan pangan karena di dalamnya para petani untuk mewujudkan kedaulatan pangan, membantu tata kelola air, sehingga produksinya dapat meningkat dan ketersediaan pangan masyarakat tercukupi.

” Apa yang kita tanam baik, Insyaallah juga akan tumbuh baik. Mari kita rawat sebaik mungkin bakal menghasilkan produksi yang baik dan hasilnya juga tidak bakal mengkhianati kita. Jika pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun daerah sedikit saja memberikan kesejahteraan kepada P3A, akan memotivasi dalam bekerja membantu sesama petani. Biarkan jika di dalam anggota P3A itu terdapat warna, itu merupakan pelangi atau sebuah

cakrawala yang perlu dirawat, sebab P3A tidak berpolitik melainkan petani untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” pungkas Mingrum Gumay yang juga sebagai Ketua DPRD Lampung.



Gubernur Arinal Apresiasi DPRD Lampung Bahas Raperda

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mengapresiasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang telah mencurahkan tenaga, pikiran dan waktu serta bersedia melakukan koordinasi yang baik dan intensif selama proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

"Sehingga menghasilkan kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021," kata Gubernur saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Pengesahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu, 20 Juli 2022.

Gubernur Arinal menuturkan, berbagai masukan, saran dan juga kritik yang disampaikan terhadap substansi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, maupun pelaksanaan program kegiatan pembangunan, baik program kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan, menjadi referensi untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan di kemudian hari.

Selanjutnya, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 yang telah mendapat persetujuan DPRD Provinsi Lampung akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan amanat pasal 195 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara itu, DPRD Provinsi Lampung melalui Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Darlian Pone, meminta seluruh dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung agar lebih kreatif dalam meningkatkan kinerjanya, misalnya dengan terus menjalin sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota serta perusahaan-perusahaan

besar sehingga meskipun dengan anggaran terbatas, pembangunan dapat tetap terlaksana dengan baik.

DPRD Provinsi Lampung juga merekomendasikan beberapa hal kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung terkait pelaksanaan anggaran. Pertama, Kepada seluruh OPD supaya lebih cermat dalam membuat perencanaan program atau kegiatan dan lebih memprioritaskan kegiatan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, terutama saat Covid-19.

Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Lampung, agar dalam memberikan anggaran kepada OPD sesuai dengan kebutuhan prioritas masing-masing OPD. Kemudian meminta seluruh OPD, agar pada setiap laporan anggaran untuk diperinci secara jelas per kegiatan. Terakhir, agar dalam merencanakan belanja modal dan operasional lebih proporsional sesuai dengan aturan yang ada.

Saat rapat paripurna juga dilakukan penandatanganan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 oleh Gubernur Lampung bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung.

Hadir dalam rapat tersebut, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Forkopimda Provinsi Lampung, Plh. Sekdaprov Lampung, Staf Ahli Gubernur, para asisten Setdaprov Lampung, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Lampung, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.



Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay Hadiri Pembukaan Porprov Lampung ke IX

Ketua DPRD Lampung hadir pembukaannya Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung ke IX yang dilaksanakan di Stadion Pahoman, Bandar Lampung. Senin (5/12/2022). Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay mengatakan ajang pekan olahraga tingkat provinsi ini merupakan salah satu strategi mempersiapkan atlet terbaik yang nantinya akan dilakukan pembinaan lanjutan untuk dipersiapkan di ajang kontestasi nasional.

" Kita ingin hasil yang lebih baik dan meningkat dalam rangka membawa nama provinsi Lampung di tingkat nasional bidang olahraga semakin baik dari sebelumnya, kita ingin porprov diselenggarakan serius dan memberikan hasil yang objektif sehingga kita akan mempersiapkan seluruhnya secara matang kedepan " Ujarnya. Legislator PDIP itu juga menuturkan melalui olahraga kita juga bisa melakukan Internalisasi nilai-nilai Perjuangan bangsa dan ikut berkontribusi dan berjuang mengharumkan nama daerah melalui prestasi yang dihasilkan.

" Tidak perlu lagi saat ini kita angkat senjata untuk menjadi sosok pahlawan bangsa, saat ini yang bangsa butuhkan adalah prestasi melalui sinergitas dan kolaborasi sehingga akan berdampak positif membawa nama baik bangsa Indonesia di mata mancanegara melalui bidang olahraga " imbuhnya. Terakhir, ia juga menghimbau setiap kontestasi memiliki 2 (dua) hasil, yakni menang dan kalah untuk itu tidak direspon berlebihan sehingga masih terjaganya kondusifitas dalam menjaga nama baik provinsi Lampung untuk penyelenggaraan kontestasi dibidang olahraga. "Saya minta pihak penyelenggara, peserta dan siapapun yang terlibat langsung dalam proses ini, mari ciptakan kondusifitas dan harmonisasi saat kegiatan berlangsung, ini penting dalam menjaga citra provinsi Lampung di kanca nasional " pungkasnya.

Diketahui Porprov dilaksanakan pada tanggal 4-13 Desember diikuti, 33 Cabang Olahraga yang di pertandingan, serta merebutkan 3.183 medali terdiri dari 887 Emas, 887 Perak dan 1.409 perunggu.

Dari Informasi yang berhasil di himpun, sekitar 4.931 atlet dan 1.230 official dari 15 kabupaten/kota meramaikan Porprov IX tahun 2022.

